

# LAPORAN EKSEKUTIF

KEADAAN ANGKATAN KERJA  
PROVINSI JAWA BARAT

*Februari 2019*



<https://www.bpsprov.jabar.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**

# LAPORAN EKSEKUTIF

KEADAAN ANGKATAN KERJA  
PROVINSI JAWA BARAT

*Februari 2019*



## **LAPORAN EKSEKUTIF KEADAAN ANGKATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT FEBRUARI 2019**

ISBN : 978-602-5745-23-2  
Katalog : 2303013.32  
No. Publikasi : 32520.1905

Ukuran Buku : 18 cm x 26 cm  
Jumlah Halaman : X + 40 Halaman

Naskah :  
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :  
Bidang Statistik Sosial

Ilustrasi Foto :  
rri.co.id (21 Februari 2018)

Diterbitkan Oleh :  
© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak Oleh :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

## **LAPORAN EKSEKUTIF KEADAAN ANGKATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT FEBRUARI 2019**

### **Tim Penyusun :**

- Penanggung jawab Umum : Ir. Dody Herlando, M.Econ.
- Penanggung jawab Teknis : Ir. Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si.
- Penulis dan Pengolah Data : Sidik Edi Sutopo, SST, M.Stat.
- Penyunting dan Editor : 1. Hendy Hario Sasongko, SST, M.Stat.  
2. Judiharto Trisnadi, SST, MM  
3. Agus Susilo, S.Si.



## KATA PENGANTAR

Publikasi ini merupakan salah satu publikasi ketenagakerjaan yang menggambarkan Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat pada Februari 2019. Laporan ini memuat ulasan ringkas dan indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada konsep *Labour Force* yang telah direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO).

Data yang disajikan diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia umumnya dan Provinsi Jawa Barat khususnya pada Bulan Februari 2019. Jumlah target sampel Sakernas Februari 2019 Provinsi Jawa Barat sebesar 5990 rumah tangga. Informasi mengenai ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat yang akan menjadi basis bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian publikasi ini diucapkan terima kasih. Saran dan kritik untuk perbaikan edisi tahun berikutnya sangat diharapkan.

Bandung, Mei 2019  
BPS Provinsi Jawa Barat  
Kepala,



Dody Herlando



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Metodologi .....	3
1.4. Sumber Data.....	4
2. ANGKATAN KERJA, PENDUDUK BEKERJA DAN PENGANGGURAN....	4
3. PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA.	11
4. PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA .....	15
5. PENDUDUK BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN .....	19
6. PENDUDUK BEKERJA MENURUT JAM KERJA.....	21
7. TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT PENDIDIKAN.....	24
8. PENUTUP.....	27
LAMPIRAN .....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel A.	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Jawa Barat, 2016-2019 (juta orang) .....	12
Tabel B.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Daerah Tempat Tinggal & Jenis Kelamin, Jawa Barat, Februari 2019 (juta orang) .....	14
Tabel C.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Menurut Pendidikan, Jawa Barat, 2016-2019 .....	25
Tabel 1.	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Klasifikasi Daerah, Jawa Barat 2016-2019.....	31
Tabel 2.	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019 .....	32
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Jawa Barat, 2016-2019 (juta jiwa) .....	33
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa) .....	34
Tabel 5.	Pekerja Formal dan Informal Menurut Klasifikasi Daerah, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa) .....	35
Tabel 6.	Pekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa) .....	36
Tabel 7.	Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Klasifikasi Daerah, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa) .....	37
Tabel 8.	Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa) .....	38
Tabel 9.	Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Klasifikasi Daerah, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa) ....	39
Tabel 10.	Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa) .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan Ketenagakerjaan .....	5
Gambar 2.2.	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran (juta orang), serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), Jawa Barat 2016-2019 .....	6
Gambar 2.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Menurut Provinsi, Indonesia, 2019 .....	7
Gambar 2.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin, Jawa Barat, 2016-2019 ....	8
Gambar 2.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jawa Barat, 2016-2019 .....	9
Gambar 2.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019 .....	10
Gambar 4.1.	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Jawa Barat, 2016-2019 (juta orang) .....	16
Gambar 4.2.	Pekerja Formal dan Informal, Jawa Barat, 2016-2019 (juta orang) .....	17
Gambar 4.3.	Pekerja Formal dan Informal Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Jawa Barat, Februari 2019 (juta orang) .....	19
Gambar 5.1.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jawa Barat, 2016-2019 .....	20
Gambar 5.2.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, Jawa Barat, 2019 .....	21
Gambar 6.1.	Pekerja Penuh, Pekerja Paruh Waktu, dan Setengah Penganggur, Jawa Barat, 2016-2019 (juta orang) .....	22
Gambar 6.2.	Pekerja Penuh, Pekerja Paruh Waktu, dan Setengah Penganggur Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Jawa Barat, 2019 (juta orang) .....	23



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan (*supply*) dan aspek kebutuhan/permintaan (*demand*). Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah tenaga kerja dapat memenuhi jumlah kebutuhan tenaga kerja, sehingga tidak ada penganggur. Apabila kondisi normal yang diharapkan tersebut belum dapat tercapai, maka akan terjadi pengangguran.

Masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, namun mencakup karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Antara lain adalah perubahan struktur umur penduduk usia kerja, tingkat pendidikan, distribusi tenaga menurut lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Secara umum, ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja disebabkan karena berlebihnya sisi *supply* atau sedikitnya sisi *demand*. Berlebihnya sisi *supply* menyebabkan terjadinya *frictional unemployment*. *Frictional unemployment* adalah tenaga kerja yang menunggu cukup lama untuk mendapatkan pekerjaan. Waktu tunggu yang lama ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara pendidikan dan lowongan pekerjaan yang tersedia, mobilitas tenaga kerja, dan kurang sampainya informasi yang diterima tenaga kerja tentang lowongan pekerjaan. Sedangkan sisi *demand* yang kurang menyebabkan terjadinya *structural unemployment*. Pengangguran di Jawa Barat adalah *frictional unemployment* yang salah satu penyebab utamanya adalah migrasi yang cukup tinggi.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mengurangi pengangguran. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat adalah mendorong para pencari kerja untuk menjalankan usaha mandiri dengan menggelar berbagai pelatihan kerja mandiri. Pelatihan tersebut digelar untuk menjalankan usaha meningkatkan motivasi, pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausaha masyarakat Jawa Barat dalam rangka membentuk kelompok rintisan kerja/usaha mandiri.

Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pengangguran diperlukan indikator-indikator sebagai dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program. Informasi tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Publikasi ini menyajikan indikator-indikator penting ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Disamping itu akan disajikan pula karakteristik ketenagakerjaan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penulisan Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas tentang kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat pada Februari tahun 2019 berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas).

### 1.3. Metodologi

Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Pada bulan Februari data yang disajikan hanya pada level provinsi karena jumlah sampel sebesar 5990 rumah tangga. Sementara itu Sakernas Agustus dapat menyajikan angka hingga level kabupaten/kota karena jumlah sampel sebesar 23.960 rumah tangga.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam menyajikan data ketenagakerjaan mengacu kepada Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Organization (ICLS)* ke-13 tahun 1984 yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization (ILO)*. Beberapa terminologi ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas.
- b. Angkatan Kerja : adalah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi yaitu aktif bekerja atau pun mencari pekerjaan.
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja : adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
- d. Penduduk bekerja adalah : penduduk usia kerja yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan minimal 1 jam berturut-turut selama seminggu yang lalu.
- e. Pencari kerja (penganggur) adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha; atau orang yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja; atau orang yang sudah putus asa dalam mencari pekerjaan.
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja terhadap angkatan kerja.

- g. Pekerja penuh adalah penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam ke atas dalam seminggu atau sementara tidak bekerja.
- h. Pekerja tidak penuh adalah penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam dalam seminggu (tidak termasuk pekerja yang sementara tidak bekerja).
- i. Setengah Pengangguran adalah penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (< 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan.
- j. Pekerja paruh waktu adalah penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (< 35 jam per minggu) tapi tidak mencari.

#### **1.4. Sumber Data**

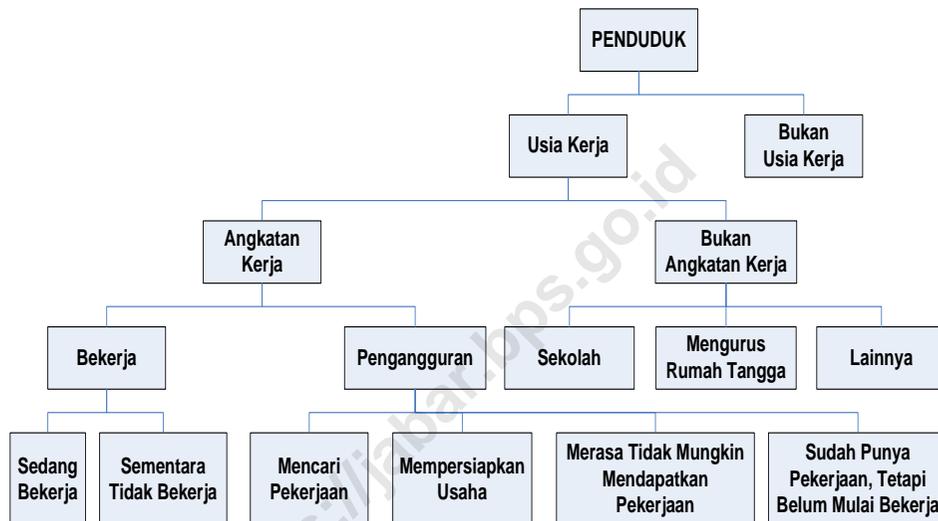
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari hasil pengumpulan data Sakernas pada bulan Februari 2019 yang setiap tahunnya diselenggarakan secara serentak diseluruh kabupaten/ kota di Indonesia.

## **2. ANGKATAN KERJA, PENDUDUK BEKERJA DAN PENGANGGURAN**

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1. Pada dasarnya ILO tidak memberikan batasan usia tertentu dalam penentuan batas minimum dari usia kerja. Hal ini disebabkan tiap negara memiliki karakteristik dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda sehingga masing-masing negara juga memiliki batas minimum yang berbeda dalam menyatakan pada usia berapa penduduknya dikatakan telah memasuki usia kerja. BPS

menggunakan batasan usia kerja 15 tahun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan juga agar relevan dengan data-data yang disajikan oleh ILO dan *World Bank* sehingga data yang dihasilkan bisa diukur perbandingannya dengan negara lain.

Gambar 2.1 Bagan Ketenagakerjaan



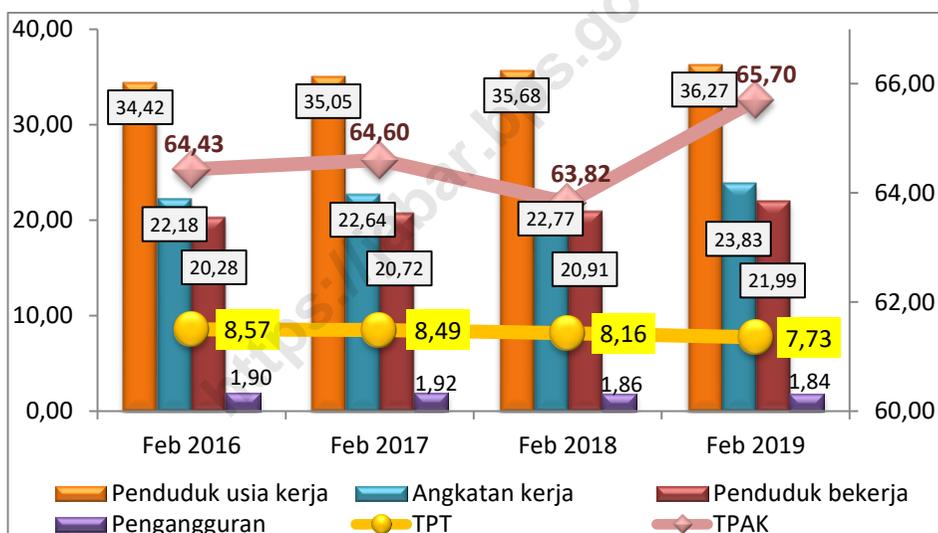
Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat pada Februari 2019 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 1,06 juta orang dibanding Februari 2018, yaitu dari 22,77 juta orang menjadi 23,83 juta orang. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk usia kerja yang juga meningkat dari 35,68 juta orang menjadi 36,27 juta orang pada kurun waktu yang sama.

Peningkatan jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja menjadi faktor penyebab dalam naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Februari 2018, TPAK

**TPAK Jawa Barat pada Februari 2019 adalah sebesar 65,70 persen, naik 1,88 persen dibanding tahun sebelumnya.**

Jawa Barat adalah sebesar 63,82 persen, naik sebesar 1,88 persen poin menjadi 65,70 persen pada Februari 2019. Angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Jawa Barat, 65 – 66 orang di antaranya aktif secara ekonomi. Hal ini menunjukkan peran aktif penduduk Jawa Barat dalam kegiatan perekonomian relatif meningkat setahun terakhir.

Gambar 2.2 Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran (juta orang), serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), Jawa Barat 2016-2019

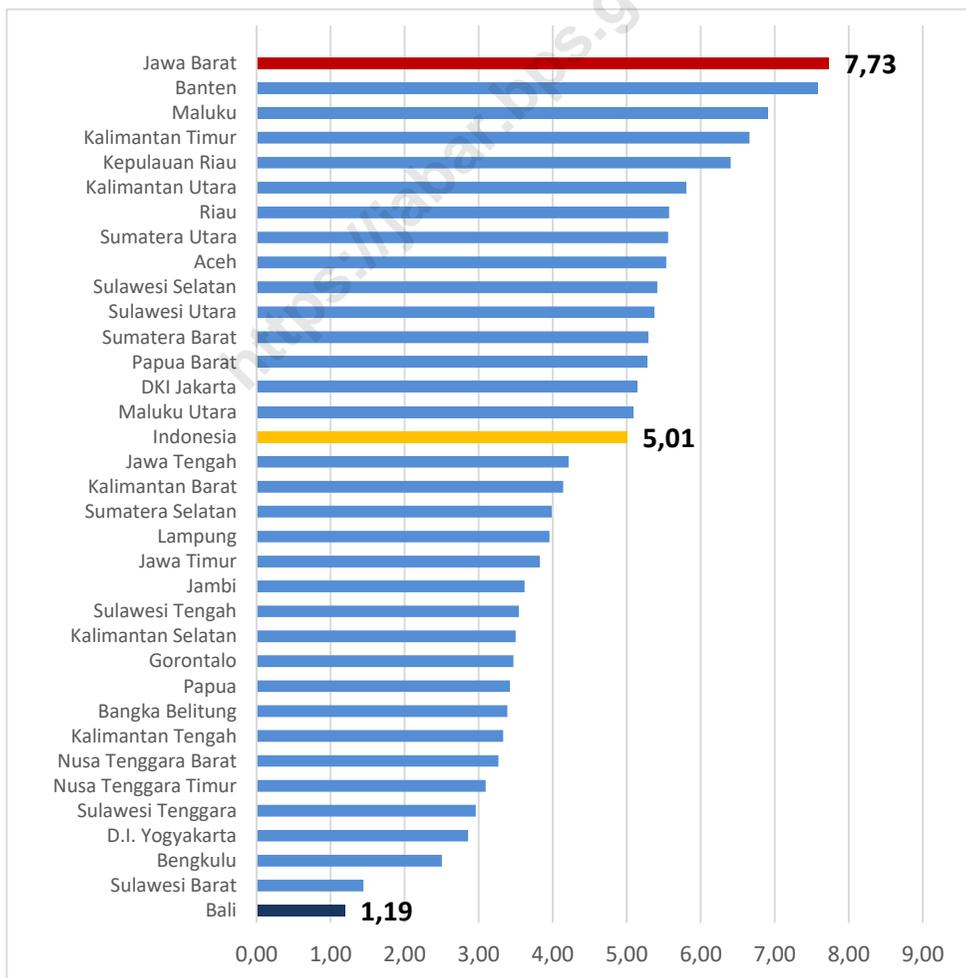


Angkatan kerja terpilah menjadi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setahun terakhir. Pada Februari 2019 penduduk yang bekerja sebanyak 21,99 juta orang, bertambah sekitar 1,08 juta orang dibanding keadaan Februari 2018. Jumlah pengangguran pada Februari 2019 menunjukkan tren yang cukup baik, karena mengalami penurunan sebesar 15,67 ribu orang dibanding keadaan Februari 2018. TPT Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,43 persen poin; dari

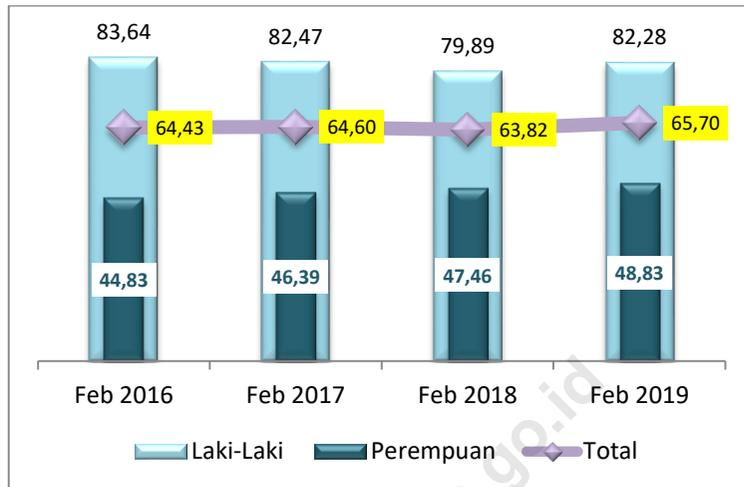
8,16 persen pada Februari 2018 menjadi 7,73 persen pada Februari 2019. Artinya, dari 10.000 orang angkatan kerja Jawa Barat, sekitar 773 orang di antaranya belum dapat terserap di pasar kerja. Walaupun mengalami penurunan namun angka TPT Jawa Barat yang tertinggi secara nasional, jauh di atas angka TPT nasional (5,01 persen).

**TPT Jawa Barat  
menurun sebesar  
0,43 persen pada  
Februari 2019  
menjadi 7,73 persen**

Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Menurut Provinsi, Indonesia, 2019



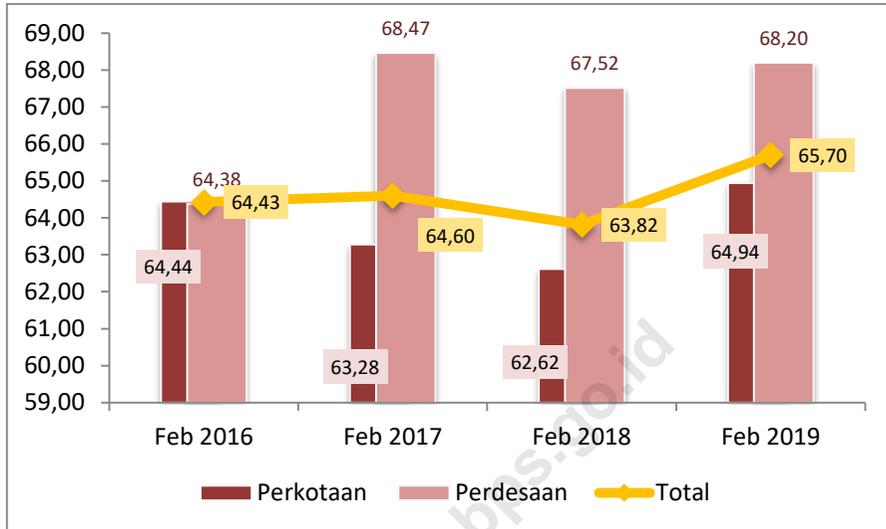
Gambar 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin, Jawa Barat, 2016-2019



Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Jawa Barat secara umum cukup berimbang. Namun, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Jawa Barat. Disadari sejak dulu bahwa laki-laki berfungsi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sementara perempuan lebih dominan mengurus rumah tangga. Sehingga wajar apabila TPAK laki-laki lebih tinggi dari yang perempuan. Namun jika dilihat *trend*, maka TPAK perempuan terus menunjukkan peningkatan. Selama 4 tahun terakhir TPAK perempuan terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang aktif secara ekonomi (Gambar 2.4).

**TPAK perempuan selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan.**

Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Jawa Barat, 2016-2019

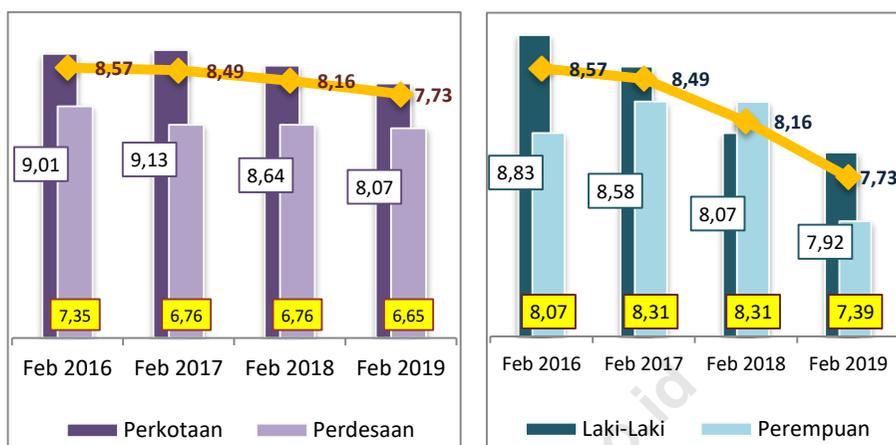


Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, secara umum TPAK di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding yang di perkotaan. Kecuali

**TPAK Jawa Barat di desa lebih tinggi daripada TPAK di kota.**

keadaan Februari 2016, TPAK di daerah perdesaan sedikit lebih rendah dibanding yang di perkotaan. Pada Februari 2019 tercatat TPAK perdesaan sebesar 68,20 persen; 3,26 persen poin lebih tinggi daripada TPAK perkotaan yang hanya sebesar 64,94 persen (Gambar 2.5).

Gambar 2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019



Jika dibedakan berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di perdesaan selalu lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan selama kurun empat tahun terakhir. Di perkotaan lebih banyak tersedia lapangan pekerjaan, sehingga banyak menarik tenaga kerja untuk datang. Hal ini berakibat terjadinya *over supply* tenaga kerja.

**Pada Februari 2019, TPT di perdesaan lebih rendah dibanding di perkotaan dan TPT laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.**

TPT menurut jenis kelamin terlihat bahwa TPT laki-laki lebih tinggi dibanding TPT perempuan. Kecuali kondisi pada tahun 2018, TPT perempuan sempat lebih tinggi daripada yang laki-laki.

### **3. PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA**

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2019, penduduk Provinsi Jawa Barat paling banyak bekerja pada sektor perdagangan, yaitu sebesar 5,06 juta orang (23,01 persen). Disusul oleh sektor industri, sektor pertanian, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masing-masing sebanyak 4,29 juta orang (19,52 persen), 3,24 juta orang (14,72 persen) dan 1,92 juta orang (8,72 persen) (Tabel A).

Dilihat berdasar tren sektoral antar tahun, terdapat beberapa sektor yang memperlihatkan pola titik balik pertumbuhan tenaga kerja. Sektor pertanian dan konstruksi yang selama kurun tahun 2016-2018 terus-menerus memperlihatkan tren penurunan jumlah tenaga kerja di tahun 2019 ini mengalami peningkatan dari kondisi tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan sektor industri pengolahan, sebagai sektor kedua terbesar penyerap tenaga kerja di Jawa Barat, justru memperlihatkan pola sebaliknya. Mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2018 namun turun di tahun 2019. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor penyediaan jasa akomodasi, dan makan minum selama empat tahun terakhir terus berlanjut hingga di tahun 2019. Menunjukkan bahwa usaha kuliner menjadi usaha yang cukup menjanjikan dan diminati oleh penduduk yang masuk angkatan kerja.

Tabel A. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Jawa Barat, 2016-2019 (juta orang)

Lapangan Usaha	Feb 2016	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,54 (17,47%)	3,55 (17,11%)	3,20 (15,28%)	3,24 (14,72%)
B Pertambangan dan Penggalian	0,13 (0,66%)	0,13 (0,65%)	0,13 (0,62%)	0,07 (0,31%)
C Industri Pengolahan	4,07 (20,06%)	4,28 (20,63%)	4,49 (21,47%)	4,29 (19,52%)
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,08 (0,38%)	0,04 (0,21%)	0,05 (0,24%)	0,03 (0,15%)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11 (0,54%)	0,10 (0,49%)	0,13 (0,61%)	0,13 (0,58%)
F Konstruksi	1,41 (6,98%)	1,36 (6,58%)	1,31 (6,29%)	1,59 (7,24%)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,02 (24,78%)	4,63 (22,36%)	4,77 (22,79%)	5,06 (23,01%)
H Transportasi dan Pergudangan	0,93 (4,56%)	0,92 (4,46%)	1,05 (5,04%)	1,05 (4,78%)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,08 (5,31%)	1,45 (7,00%)	1,49 (7,12%)	1,92 (8,72%)
J Informasi dan Komunikasi	0,14 (0,69%)	0,30 (1,43%)	0,29 (1,40%)	0,21 (0,96%)
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38 (1,88%)	0,41 (1,99%)	0,42 (1,99%)	0,41 (1,85%)
L Real Estat	0,09 (0,43%)	0,11 (0,55%)	0,09 (0,42%)	0,11 (0,51%)
M,N Jasa Perusahaan	0,29 (1,43%)	0,37 (1,77%)	0,36 (1,72%)	0,35 (1,60%)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58 (2,84%)	0,61 (2,96%)	0,54 (2,59%)	0,60 (2,73%)
P Jasa Pendidikan	0,89 (4,38%)	1,08 (5,22%)	0,99 (4,75%)	1,09 (4,95%)
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23 (1,14%)	0,30 (1,46%)	0,37 (1,77%)	0,33 (1,51%)
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,31 (6,47%)	1,07 (5,15%)	1,23 (5,89%)	1,51 (6,86%)
Total	20,28 (100%)	20,72 (100%)	20,91 (100%)	21,99 (100%)

Selama Februari 2018 sampai dengan Februari 2019; dari 5 sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja 3 diantaranya mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja. Yaitu masing-masing adalah sektor akomodasi dan penyediaan makan minum (naik 1,60 persen poin), sektor konstruksi (0,95 persen poin) dan sektor perdagangan (0,22 persen poin). Dua sektor usaha terbesar Jawa Barat lainnya yaitu industri dan pertanian mengalami penurunan persentase penduduk yang bekerja, yaitu masing-masing turun 1,95 dan 0,56 persen poin. Penurunan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi di sektor industri tersebut dimungkinkan karena dampak dari tingginya standar pengupahan buruh/pekerja di Jawa Barat. Tercatat di semester dua tahun 2018 beberapa industri garmen di Karawang, Purwakarta dan Cimahi menutup usaha karena alasan UMK yang tinggi. Adapun penurunan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih diakibatkan karena cukup besarnya peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor lain dibanding yang terjadi pada sektor ini.

Sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja cukup besar adalah konstruksi. Berbeda dari tren 3 tahun sebelumnya yang memperlihatkan pola penurunan, di tahun 2019 memperlihatkan fenomena yang berbeda. Proyek pembangunan sarana transportasi; pembangunan infrastruktur jalan tol layang, LRT dan kereta cepat, yang merupakan program nasional di beberapa wilayah diduga menjadi salah satu penyebabnya.

Tabel B menyajikan gambaran lapangan usaha menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin. Di daerah perkotaan lapangan usaha yang paling tinggi menyerap tenaga kerja adalah perdagangan (24,63 persen) dan industri (20,58 persen). Sektor industri memang lebih banyak muncul di daerah perkotaan. Sebaliknya, di daerah perdesaan

mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian (38,49 persen), dimana lahan-lahan pertanian masih banyak yang tersedia.

Tabel B. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Daerah Tempat Tinggal & Jenis Kelamin, Jawa Barat, Februari 2019 (juta orang)

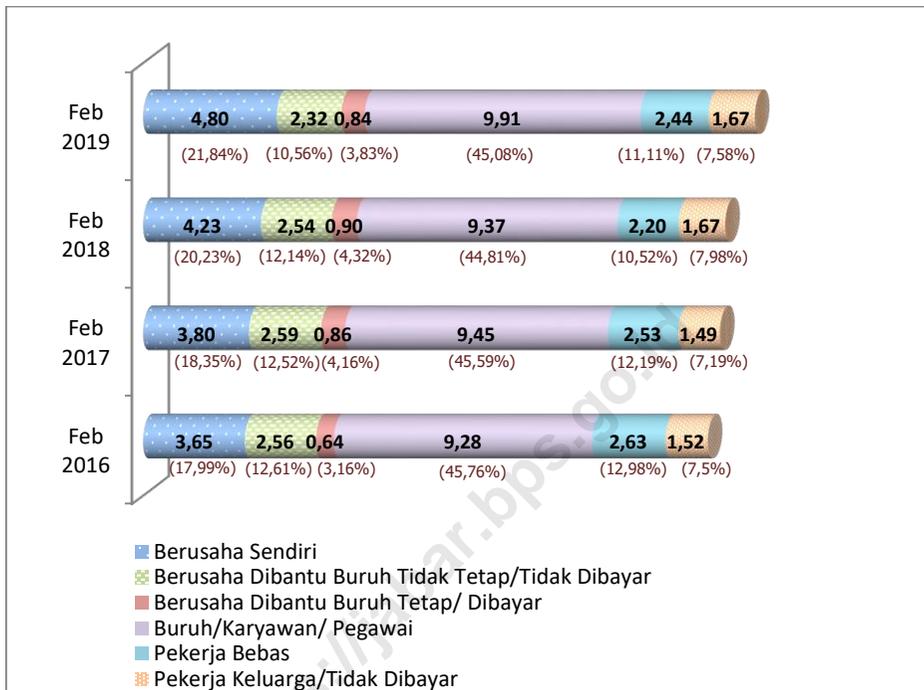
Lapangan Usaha	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,15 (6,93%)	2,09 (38,49%)	2,1 (15,17%)	1,13 (13,96%)
B Pertambangan dan Penggalian	0,06 (0,34%)	0,01 (0,23%)	0,06 (0,47%)	0,004 (0,05%)
C Industri Pengolahan	3,41 (20,58%)	0,88 (16,29%)	2,67 (19,28%)	1,62 (19,94%)
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,03 (0,17%)	0,01 (0,1%)	0,03 (0,23%)	0,002 (0,02%)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11 (0,68%)	0,01 (0,25%)	0,09 (0,67%)	0,03 (0,41%)
F Konstruksi	1,16 (6,98%)	0,44 (8,03%)	1,57 (11,34%)	0,02 (0,25%)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,08 (24,63%)	0,98 (18,07%)	2,73 (19,68%)	2,33 (28,69%)
H Transportasi dan Pergudangan	0,9 (5,45%)	0,15 (2,75%)	1,01 (7,29%)	0,04 (0,52%)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62 (9,78%)	0,3 (5,5%)	0,96 (6,91%)	0,96 (11,81%)
J Informasi dan Komunikasi	0,2 (1,21%)	0,01 (0,21%)	0,16 (1,14%)	0,05 (0,66%)
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38 (2,29%)	0,03 (0,51%)	0,27 (1,91%)	0,14 (1,74%)
L Real Estat	0,11 (0,67%)	0 (0%)	0,09 (0,66%)	0,02 (0,24%)
M,N Jasa Perusahaan	0,33 (2,01%)	0,02 (0,35%)	0,3 (2,16%)	0,05 (0,64%)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,52 (3,15%)	0,08 (1,45%)	0,46 (3,32%)	0,14 (1,73%)
P Jasa Pendidikan	0,88 (5,31%)	0,21 (3,85%)	0,48 (3,45%)	0,61 (7,5%)
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31 (1,85%)	0,03 (0,46%)	0,12 (0,84%)	0,21 (2,63%)
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,32 (7,97%)	0,19 (3,46%)	0,76 (5,47%)	0,75 (9,22%)
Total	16,56 (100%)	5,43 (100%)	13,86 (100%)	8,13 (100%)

Ada perbedaan yang cukup nyata dari lapangan usaha yang digeluti oleh laki-laki dan perempuan. Perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian menjadi sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun konstruksi dan transportasi masih memperlihatkan fenomena sebagai sektor yang didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada Februari 2019, sebanyak 1,57 juta orang atau sekitar 11,34 persen penduduk laki-laki bekerja di sektor konstruksi. Sedangkan perempuan yang bekerja di sektor konstruksi hanya sekitar 0,25 persen atau sekitar 20 ribu jiwa. Begitu juga di sektor transportasi dan pergudangan, ada sebesar 7,29 persen penduduk laki-laki yang bekerja di sektor tersebut, sedangkan penduduk perempuan hanya 0,52 persen.

#### **4. PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA**

Dari seluruh penduduk bekerja pada Februari 2019, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai sebesar 9,91 juta orang (45,08 persen). Kemudian diikuti status Berusaha Sendiri sebesar 4,80 juta orang (21,84 persen), Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 2,32 juta orang (10,56 persen), Pekerja bebas sebesar 2,44 juta orang (11,11 persen), serta Pekerja Keluarga/Tak dibayar sebesar 1,67 juta orang (7,58 persen). Sementara penduduk yang bekerja dengan status Berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 0,84 juta orang (3,83 persen). Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan tren sebelumnya. (Gambar 4.1).

Gambar 4.1 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Jawa Barat, 2016-2019 (juta orang)



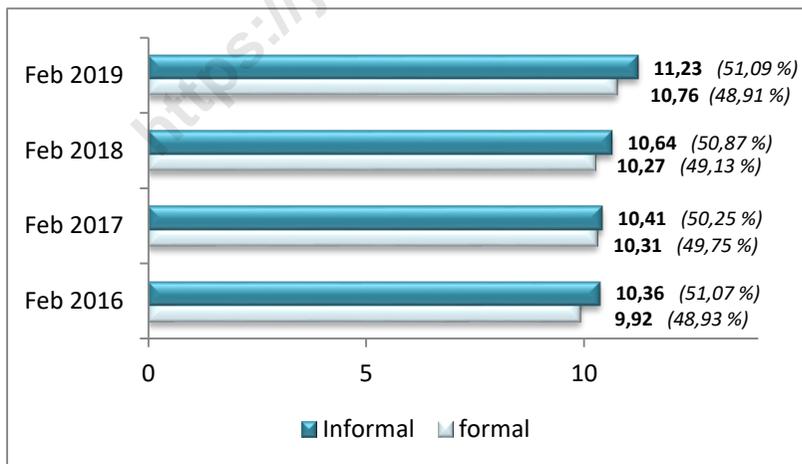
Dalam setahun terakhir (Februari 2018-Februari 2019), persentase penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri meningkat sebesar 1,61 persen poin dari 20,23 persen menjadi 21,84 persen. Peningkatan juga terjadi pada status pekerja Buruh/Karyawan/Pegawai (0,27 persen poin) dan pekerja bebas (0,59 persen poin).

Secara sederhana, berdasarkan status pekerjaan, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2019 sebanyak 10,76 juta orang (48,91 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 11,23 juta orang (51,09 persen) bekerja pada kegiatan informal. Selama

setahun terakhir pekerja informal meningkat sebesar 0,22 persen poin dari 50,87 persen pada Februari 2018 menjadi 51,09 persen pada Februari 2019.

Pada periode Februari 2018 – Februari 2019 peningkatan pekerja informal lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pekerja formal. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor informal tersebut sejalan dengan peningkatan tenaga kerja di sektor perdagangan dan penyediaan makan minum, dimana kedua sektor ini sangat kental dengan kegiatan informal. Turunnya tenaga kerja sektor industri akibat penutupan beberapa usaha garmen di Jawa Barat dimungkinkan menjadikan kedua sektor tersebut sebagai pilihan sementara sampai mendapatkan pekerjaan pengganti.

Gambar 4.2 Pekerja Formal dan Informal, Jawa Barat, 2016-2019 (juta orang)

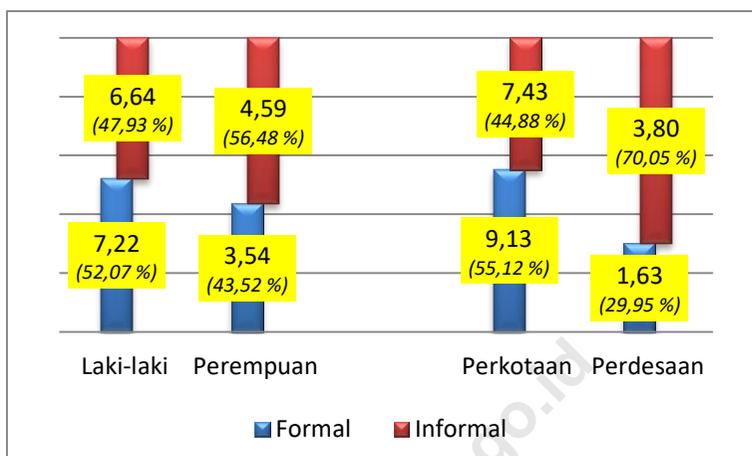


Jika dilihat lebih mendalam, terdapat pola yang berbeda antara pekerja formal dan informal untuk daerah perkotaan dengan perdesaan. Hasil Sakernas Februari 2019 menunjukkan bahwa di daerah perkotaan lebih didominasi oleh pekerja formal hingga mencapai 55,12 persen (pekerja informal sebesar 44,88 persen). Sedangkan di perdesaan persentase pekerja informal sangat tinggi yaitu sebesar 70,05 persen. Dominasi ini terutama disebabkan di perdesaan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Pada sektor ini peran pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak dibayar/tetap, buruh lepas dan pekerja keluarga cukup dominan (Gambar 4.3).

**Daerah perkotaan didominasi oleh pekerja formal (55,12 persen). Daerah perdesaan didominasi oleh pekerja informal (70,05 persen).**

Perbedaan jumlah pekerja formal dan informal pada pekerja laki-laki pun cukup signifikan dibandingkan dengan yang perempuan. Pada Februari 2019, sekitar 52,07 persen pekerja laki-laki adalah pekerja formal. Sementara itu pekerja formal perempuan hanya sekitar 43,52 persen. Hal ini disebabkan oleh dominasi perempuan sebagai pekerja keluarga dibandingkan laki-laki (Lampiran 6).

Gambar 4.3 Pekerja Formal dan Informal Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Jawa Barat, Februari 2019 (juta orang)



## 5. PENDUDUK BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN

Pendidikan yang ditamatkan dapat menjadi salah satu indikator dari kualitas tenaga kerja itu sendiri. Pada Februari 2019, tenaga kerja di Jawa Barat masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 8,77 juta orang dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3,91 juta orang. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 2,68 juta orang mencakup 0,7 juta berpendidikan Diploma dan 1,98 juta berpendidikan Universitas (Lampiran 9).

Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja berpendidikan tinggi naik 0,39 persen poin yaitu dari 11,81 persen pada Februari 2018 menjadi 12,20 persen pada Februari 2019. Demikian halnya dengan penduduk bekerja berpendidikan menengah naik 0,18 persen poin, sementara persentase penduduk bekerja berpendidikan rendah turun sebesar 0,57 persen poin.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jawa Barat, 2016-2019

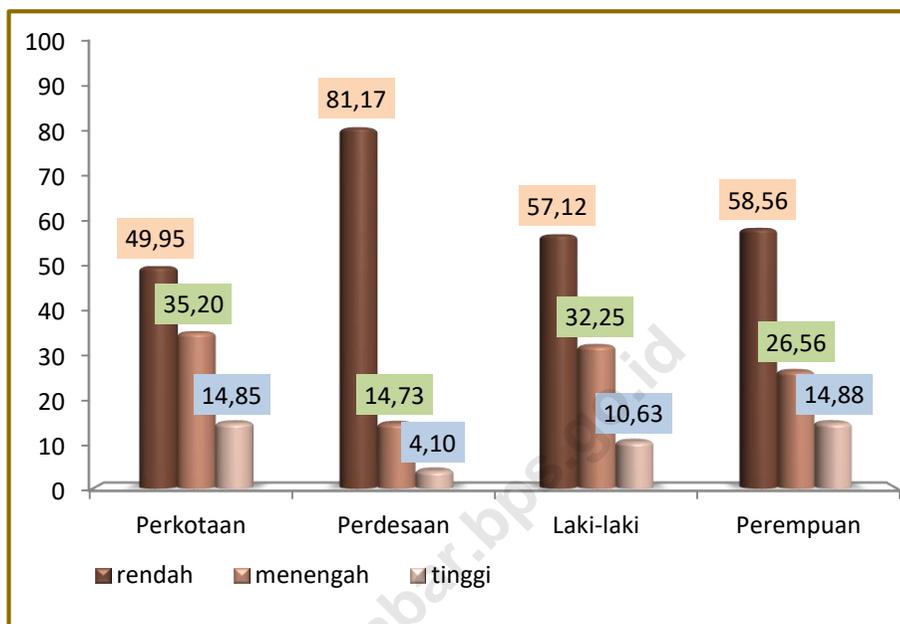


Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, penduduk bekerja di perdesaan dan yang di perkotaan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Dominasi pekerja berpendidikan rendah sangat tinggi di perdesaan yaitu mencapai 81,17 persen, sementara di perkotaan hanya

49,95 persen. Hal ini berkaitan dengan lapangan usaha yang tersedia di perdesaan masih memungkinkan untuk dikerjakan oleh yang berpendidikan rendah, juga diakibatkan ketersediaan sarana dan prasarana di perdesaan yang belum setara dengan di perkotaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pada sisi yang lain, penduduk perdesaan memiliki kecenderungan tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan di perkotaan.

**Persentase penduduk bekerja yang berpendidikan rendah menurun setahun terakhir. Sebaliknya yang berpendidikan menengah dan tinggi meningkat.**

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, Jawa Barat, 2019



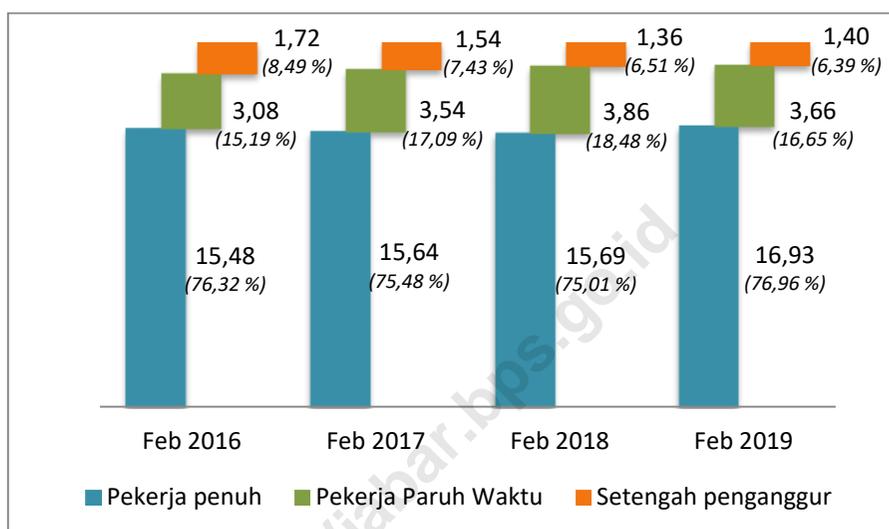
## 6. PENDUDUK BEKERJA MENURUT JAM KERJA

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja tidak penuh yakni mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Dikatakan lebih mendalam karena mampu mengungkap dibalik status bekerja ternyata sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah dan diantara mereka termasuk dalam setengah penganggur.

Pekerja tak penuh dibagi 2 (dua), yaitu setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Setengah penganggur adalah penduduk yang bekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam per minggu, dan hingga masa pencacahan masih mencari pekerjaan. Pekerja paruh waktu adalah penduduk yang bekerja dibawah 35 jam per minggu, namun sudah tidak mencari pekerjaan lain. Pekerja paruh waktu tidak selamanya

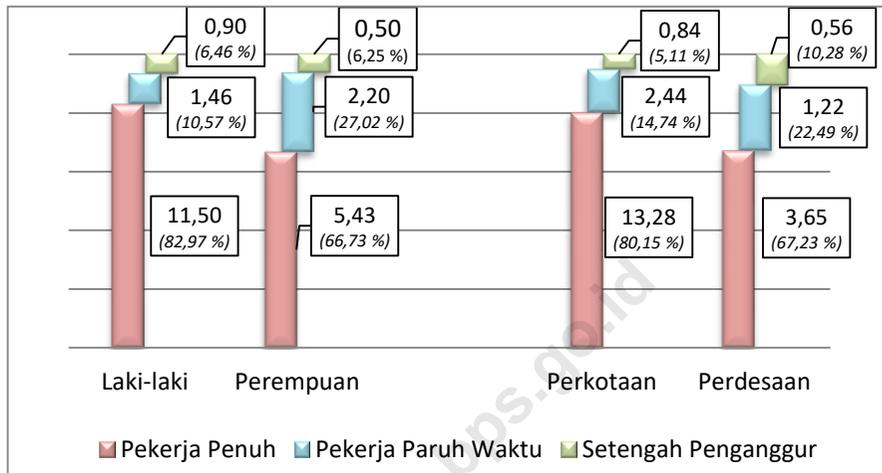
berkonotasi negatif, karena ada juga jenis pekerjaan yang bersifat profesional yang tidak membutuhkan jam kerja yang panjang.

Gambar 6.1 Pekerja Penuh, Pekerja paruh Waktu, dan Setengah Penganggur, Jawa Barat, 2016-2019 (juta orang)



Pada Februari 2019, persentase pekerja tidak penuh sebesar 23,04 persen turun 1,95 persen poin jika dibanding Februari 2018 yang sebesar 24,99 persen. Secara persentase kondisi pekerja tidak penuh Februari 2019 adalah yang terendah dalam kurun 4 tahun terakhir, dimana pada periode 2016-2018 angka tersebut terus mengalami kenaikan. Dari dua jenis pekerja tidak penuh, pekerja paruh waktu memiliki fenomena yang sejalan yaitu mengalami penurunan di 2019 setelah tren peningkatan di periode 2016-2018. Penurunan pekerja paruh waktu sebesar 1,83 persen poin di tahun 2019 mengindikasikan sebagai faktor penyebab turunnya persentase pekerja tidak penuh. Sementara pada pekerja setengah penganggur dari tahun ke tahun memperlihatkan tren yang sama yaitu penurunan yang cenderung melambat, di mana pada 2019 penurunannya sebesar 0,12 persen poin.

Gambar 6.2 Pekerja Penuh, Pekerja Paruh Waktu, dan Setengah Penganggur Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, Jawa Barat, 2019 (juta orang)



Gambar 6.2 menunjukkan bahwa jumlah pekerja berdasarkan jumlah jam kerja didominasi oleh pekerja penuh, baik untuk pekerja di perkotaan, maupun yang perdesaan, untuk pekerja laki-laki dan yang perempuan. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pada pekerja setengah penganggur, dimana persentase setengah penganggur di perdesaan (10,28 persen) lebih tinggi daripada yang di perkotaan (5,11 persen). Hal ini dapat terjadi salah satunya disebabkan oleh banyaknya pekerja informal di perdesaan, sehingga mereka bekerja serabutan dan terpaksa menerima atau melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sambil terus mencari dan menunggu kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka persentase pekerja setengah penganggur tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata antara laki-laki (6,46 persen) maupun perempuan (6,25 persen). Fenomena justru nampak pada kelompok pekerja paruh waktu dimana

persentase perempuan (27,02 persen) jauh lebih tinggi dibanding laki-laki (10,57 persen). Hal tersebut dimungkinkan karena perempuan, khususnya yang sudah berkeluarga, harus membagi waktu untuk mengurus rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja bagi sebagian perempuan adalah untuk membantu ekonomi rumah tangga dan bukan menjadi prioritas utama.

## **7. TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT PENDIDIKAN**

Pengangguran pada umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, selain itu angkatan kerja yang tersedia tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari kerja. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta arus migrasi dari luar provinsi yang cukup tinggi juga memicu tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Hal-hal di atas menyebabkan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat penganggurannya cukup tinggi.

Pendidikan merupakan modal bagi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun keterampilan sumber daya manusia, sehingga lebih memudahkan sumber daya manusia tersebut dalam mencari pekerjaan karena mempunyai nilai daya saing yang tinggi dan berakibat pada berkurangnya tingkat pengangguran yang ada. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan menyebabkan penduduk berpendidikan rendah sulit untuk mampu bersaing di pasar kerja.

Tabel C. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Menurut Pendidikan, Jawa Barat, 2016-2019

Tingkat Pendidikan	Februari 2016	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>≤ SD</b>	6,05	7,69	4,59	5,05
<b>SMP</b>	10,30	8,76	10,28	9,50
<b>SMA Umum</b>	8,91	8,48	8,95	8,02
<b>SMA Kejuruan</b>	14,30	13,57	13,23	12,22
<b>Diploma I/II/III</b>	8,33	5,28	12,66	8,45
<b>Universitas</b>	8,39	4,90	7,61	7,86
<b>Total</b>	<b>8,57</b>	<b>8,49</b>	<b>8,16</b>	<b>7,73</b>

Fenomena unik terdapat pada pengangguran dengan pendidikan SD ke bawah, dimana TPT nya lebih rendah daripada mereka yang berpendidikan SMP ke atas. Hal ini terjadi dimungkinkan angkatan kerja pada kelompok ini tidak lagi memilih bidang pekerjaan maupun upah yang didapatkan. Selain itu, orang pada kelompok ini cenderung berada pada tingkat ekonomi bawah, sehingga tidak ada pilihan lain selain bekerja, minimal untuk dapat menyambung hidupnya, meski pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan harapannya, baik dari segi keahlian maupun penghasilan yang diperoleh (Tabel C).

Selain angka TPT untuk jenjang pendidikan SD ke bawah, secara umum, angka TPT untuk jenjang pendidikan Universitas juga cenderung lebih rendah dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi (sarjana ke atas) dapat memberikan peluang kerja dan kemampuan daya saing yang lebih tinggi dalam mendapatkan pekerjaan.

Selama empat tahun terakhir, TPT dari jenjang pendidikan SMA Kejuruan merupakan TPT tertinggi jika dibandingkan dengan tingkat

pendidikan lain. Salah satu penyebabnya adalah adanya *miss and match* antara kualifikasi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada Februari 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 12,22 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada jenjang SMP sebesar 9,50 persen.

**Pada Februari 2019 TPT di semua jenjang pendidikan mengalami penurunan kecuali SD ke bawah dan Universitas dibanding setahun sebelumnya.**

Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMK. TPT terendah terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah sebesar 5,05 persen dan berikutnya terdapat pada Universitas sebesar 7,86 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami penurunan pada semua jenjang pendidikan kecuali SD ke bawah dan Universitas.

Penganggur dengan pendidikan SMK sudah mempunyai keahlian. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memberikan peluang bagi mereka untuk memanfaatkan keahliannya. Pemberian bantuan usaha merupakan salah satu upaya agar mereka dapat membuka lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri bahkan untuk orang lain.

## 8. PENUTUP

- ✓ Keadaan ketenagakerjaan Jawa Barat pada Februari 2019 cenderung lebih baik dibandingkan Februari 2018.
- ✓ Angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 23,83 juta orang, naik sekitar 1,06 juta orang dibanding Februari 2018.
- ✓ Penduduk bekerja Februari 2019 sebanyak 21,99 juta orang, bertambah sekitar 1,08 juta orang dibanding keadaan Februari 2018.
- ✓ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2018 adalah sebesar 63,82 persen, naik 1,88 persen poin menjadi 65,70 persen pada Februari 2019.
- ✓ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2019 sebesar 7,73 persen, mengalami penurunan sebesar 0,43 persen poin dibanding Februari 2018.
- ✓ Struktur ketenagakerjaan berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Lima sektor lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja, yaitu Sektor Perdagangan (23,01 persen), Sektor Industri Pengolahan (19,52 persen), Sektor Pertanian (14,72 persen), Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,72 persen) dan Sektor Konstruksi (7,24 persen).
- ✓ Sekitar 48,91 persen penduduk yang bekerja pada Februari 2019 berada pada kegiatan formal. Persentase pekerja formal turun 0,22 persen poin jika dibandingkan pada Februari 2018.
- ✓ Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2019, sebanyak 76,96 persen pekerja termasuk ke dalam kategori pekerja penuh,

sedangkan sisanya termasuk ke dalam pekerja paruh waktu (16,65 persen), dan setengah penganggur (6,39 persen).

- ✓ Berdasarkan tingkat pendidikannya, TPT SMA Kejuruan paling tinggi dibanding tingkat pendidikan lainnya. Pada Februari 2019, TPT pada seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan kecuali SD ke bawah dan Universitas.

<https://jabar.bps.go.id>

## **LAMPIRAN**

<https://jabar.bps.go.id>



Tabel 1. Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja, Tingkat Partistipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Klasifikasi Daerah, Jawa Barat 2016-2019

Bulan/Tahun	Kota/Desa	Penduduk Usia Kerja (Juta)	Angkatan Kerja (Juta)	Bekerja (Juta)	TPAK (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Februari 2016	Perkotaan	25,27	16,28	14,82	64,44	9,01
	Pedesaan	9,15	5,90	5,46	64,38	7,35
	Total	34,42	22,18	20,28	64,43	8,57
Februari 2017	Perkotaan	26,09	16,50	15,00	63,28	9,13
	Pedesaan	8,96	6,14	5,72	68,47	6,76
	Total	35,05	22,64	20,72	64,60	8,49
Februari 2018	Perkotaan	26,93	16,86	15,40	62,62	8,64
	Pedesaan	8,75	5,91	5,51	67,52	6,76
	Total	35,68	22,77	20,91	63,82	8,16
Februari 2019	Perkotaan	27,75	18,02	16,56	64,94	8,07
	Pedesaan	8,52	5,81	5,43	68,20	6,65
	Total	36,27	23,83	21,99	65,70	7,73

Tabel 2. Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja, Tingkat Partistipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019

Bulan/Tahun	Jenis Kelamin	Penduduk Usia Kerja (Juta)	Angkatan Kerja (Juta)	Bekerja (Juta)	TPAK (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Februari 2016	Laki-laki	17,38	14,54	13,26	83,64	8,83
	Perempuan	17,04	7,64	7,02	44,83	8,07
	Total	34,42	22,18	20,28	64,43	8,57
Februari 2017	Laki-laki	17,69	14,59	13,34	82,47	8,58
	Perempuan	17,36	8,05	7,38	46,39	8,31
	Total	35,05	22,64	20,72	64,60	8,49
Februari 2018	Laki-laki	18,00	14,38	13,22	79,89	8,07
	Perempuan	17,68	8,39	7,69	47,46	8,31
	Total	35,68	22,77	20,91	63,82	8,16
Februari 2019	Laki-laki	18,29	15,05	13,86	82,28	7,92
	Perempuan	17,98	8,78	8,13	48,83	7,39
	Total	36,27	23,83	21,99	65,70	7,73

Tabel 3. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa)

Lapangan Usaha	Feb 2016	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,54	3,55	3,20	3,24
B Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,13	0,13	0,07
C Industri Pengolahan	4,07	4,28	4,49	4,29
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,04	0,05	0,03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,13	0,13
F Konstruksi	1,41	1,36	1,31	1,59
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,02	4,63	4,77	5,06
H Transportasi dan Pergudangan	0,93	0,92	1,05	1,05
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,08	1,45	1,49	1,92
J Informasi dan Komunikasi	0,14	0,30	0,29	0,21
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	0,41	0,42	0,41
L Real Estat	0,09	0,11	0,09	0,11
M,N Jasa Perusahaan	0,29	0,37	0,36	0,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	0,61	0,54	0,60
P Jasa Pendidikan	0,89	1,08	0,99	1,09
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23	0,30	0,37	0,33
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,31	1,07	1,23	1,51
Total	20,28	20,72	20,91	21,99

Tabel 4. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa)

Bulan/ Tahun	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	Buruh/ karyawan	Pekerja bebas pertanian	Pekerja bebas non pertanian	Pekerja tak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Feb 2016	3,65	2,56	0,64	9,28	1,09	1,54	1,52	20,28
Feb 2017	3,80	2,60	0,86	9,45	1,08	1,45	1,49	20,72
Feb 2018	4,23	2,54	0,90	9,37	0,86	1,34	1,67	20,91
Feb 2019	4,80	2,32	0,84	9,91	1,03	1,42	1,67	21,99

Tabel 5. Pekerja Formal dan Informal Menurut Klasifikasi Daerah, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa)

Bulan/Tahun	Kota/Desa	Pekerja Formal	Pekerja Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Februari 2016	Perkotaan	8,33	6,49	14,82
	Pedesaan	1,59	3,87	5,46
	Total	9,92	10,36	20,28
Februari 2017	Perkotaan	8,69	6,31	15,00
	Pedesaan	1,62	4,10	5,72
	Total	10,31	10,41	20,72
Februari 2018	Perkotaan	8,65	6,75	15,40
	Pedesaan	1,62	3,89	5,51
	Total	10,27	10,64	20,91
Februari 2019	Perkotaan	9,13	7,43	16,56
	Pedesaan	1,63	3,80	5,43
	Total	10,76	11,23	21,99

Tabel 6. Pekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa)

Bulan/Tahun	Kota/Desa	Pekerja Formal	Pekerja Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Februari 2016	Laki-laki	6,74	6,52	13,26
	Perempuan	3,18	3,84	7,02
	Total	9,92	10,36	20,28
Februari 2017	Laki-laki	7,01	6,33	13,34
	Perempuan	3,30	4,08	7,38
	Total	10,31	10,41	20,72
Februari 2018	Laki-laki	6,88	6,34	13,22
	Perempuan	3,39	4,30	7,69
	Total	10,27	10,64	20,91
Februari 2019	Laki-laki	7,22	6,64	13,86
	Perempuan	3,54	4,59	8,13
	Total	10,76	11,23	21,99

Tabel 7. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Klasifikasi Daerah, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa)

Tahun	Kota/Desa	Pekerja Penuh ( $\geq$ 35 jam Per Minggu)	Pekerja Tidak Penuh (< 35 Jam Per Minggu)			Total Bekerja
			Setengah Penganggur	Pekerja Paruh Waktu	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Februari 2016	Perkotaan	11,86	1,02	1,94	2,96	14,82
	Pedesaan	3,62	0,70	1,14	1,84	5,46
	Total	15,48	1,72	3,08	4,80	20,28
Februari 2017	Perkotaan	11,85	0,95	2,20	3,15	15,00
	Pedesaan	3,79	0,59	1,34	1,93	5,72
	Total	15,64	1,54	3,54	5,08	20,72
Februari 2018	Perkotaan	12,05	0,79	2,56	3,35	15,40
	Pedesaan	3,64	0,57	1,30	1,87	5,51
	Total	15,69	1,36	3,86	5,22	20,91
Februari 2019	Perkotaan	13,28	0,84	2,44	3,28	16,56
	Pedesaan	3,65	0,56	1,22	1,78	5,43
	Total	16,93	1,40	3,66	5,06	21,99

Tabel 8. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa)

Tahun	Jenis Kelamin	Pekerja Penuh ( $\geq$ 35 jam Per Minggu)	Pekerja Tidak Penuh (< 35 Jam Per Minggu)			Total Bekerja
			Setengah Penganggur	Pekerja Paruh Waktu	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Februari 2016	Laki-laki	10,82	1,08	1,36	2,44	13,26
	Perempuan	4,66	0,64	1,72	2,36	7,02
	Total	15,48	1,72	3,08	4,80	20,28
Februari 2017	Laki-laki	10,91	0,97	1,46	2,43	13,34
	Perempuan	4,73	0,57	2,08	2,65	7,38
	Total	15,64	1,54	3,54	5,08	20,72
Februari 2018	Laki-laki	10,75	0,92	1,55	2,47	13,22
	Perempuan	4,94	0,44	2,31	2,75	7,69
	Total	15,69	1,36	3,86	5,22	20,91
Februari 2019	Laki-laki	11,50	0,90	1,46	2,36	13,86
	Perempuan	5,43	0,50	2,20	2,70	8,13
	Total	16,93	1,40	3,66	5,06	21,99

Tabel 9. Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Klasifikasi Daerah, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa)

Bulan/Thn	Kota/Desa	Pendidikan Dasar			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
		<= SD	SMP	Total	SMA	SMK	Total	Diploma I/II/III	Universitas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Feb 2016	Perkotaan	4,97	2,82	7,79	2,97	2,07	5,04	0,55	1,44	1,99
	Pedesaan	3,76	0,86	4,62	0,43	0,24	0,67	0,03	0,14	0,17
	Total	8,73	3,68	12,41	3,40	2,31	5,71	0,58	1,58	2,16
Feb 2017	Perkotaan	4,47	2,80	7,27	2,91	2,36	5,27	0,68	1,78	2,46
	Pedesaan	3,68	1,03	4,71	0,44	0,33	0,77	0,05	0,19	0,24
	Total	8,15	3,83	11,98	3,35	2,69	6,04	0,73	1,97	2,70
Feb 2018	Perkotaan	4,92	2,78	7,70	2,87	2,58	5,45	0,56	1,69	2,25
	Pedesaan	3,45	1,03	4,48	0,42	0,39	0,81	0,05	0,17	0,22
	Total	8,37	3,81	12,18	3,29	2,97	6,26	0,61	1,86	2,47
Feb 2019	Perkotaan	5,29	2,98	8,27	3,22	2,61	5,83	0,66	1,80	2,46
	Pedesaan	3,48	0,93	4,41	0,47	0,33	0,80	0,04	0,18	0,22
	Total	8,77	3,91	12,68	3,69	2,94	6,63	0,70	1,98	2,68

Tabel 10. Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Jawa Barat 2016-2019 (juta jiwa)

Bulan/Thn	Jenis Kelamin	Pendidikan Dasar			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
		<= SD	SMP	Total	SMA	SMK	Total	Diploma I/II/III	Universitas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Feb 2016	Laki-laki	5,74	2,33	8,07	2,33	1,67	4,00	0,30	0,90	1,20
	Perempuan	2,99	1,35	4,34	1,07	0,64	1,71	0,29	0,68	0,97
	Total	8,73	3,68	12,41	3,40	2,31	5,71	0,59	1,58	2,16
Feb 2017	Laki-laki	5,21	2,52	7,73	2,25	1,90	4,15	0,38	1,07	1,45
	Perempuan	2,94	1,31	4,25	1,10	0,79	1,89	0,35	0,90	1,25
	Total	8,15	3,83	11,98	3,35	2,69	6,04	0,73	1,97	2,70
Feb 2018	Laki-laki	5,06	2,41	7,47	2,21	2,09	4,30	0,34	1,11	1,45
	Perempuan	3,31	1,40	4,71	1,08	0,88	1,96	0,27	0,75	1,02
	Total	8,37	3,81	12,18	3,29	2,97	6,26	0,61	1,86	2,47
Feb 2019	Laki-laki	5,39	2,53	7,92	2,33	2,14	4,47	0,33	1,14	1,47
	Perempuan	3,38	1,38	4,76	1,36	0,80	2,16	0,37	0,84	1,21
	Total	8,77	3,91	12,68	3,69	2,94	6,63	0,70	1,98	2,68

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH. Mustafa No. 43 Bandung  
Telp. (022) 7272595 – 7201696  
Email [bps3200@bps.go.id](mailto:bps3200@bps.go.id).  
<http://jabar.bps.go.id>

ISBN 978-602-5745-23-2

